

Strategi Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Perkotaan

Endri Bagus Prastiyo¹, Miswanto¹

¹*Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjung Pinang*

Corresponding author: misanto0584@gmail.com

Received : January 2017; Accepted; May 2017 ; Published : November 2017

Abstract

The presence of street vendors in the corners of the city provides benefits to consumers, government or to traders such as reducing the number of unemployed, as well as providing various community needs at relatively affordable prices. On the other hand, street vendors are often associated with negative impacts on the urban environment with the appearance of dirty, dirty, and disorderly impression. No wonder if people often complain as a result of the activities of street vendors who use public facilities to sell. Community empowerment ideally not only develops the economic potential of the people, but also the dignity, dignity, self-esteem and self-esteem, maintaining the local cultural values. Empowerment as an implementation of socio-cultural concept in people-centered development, not only grow and develop economic added value, but also social value added and added value culture. Non-formal education serves membelajarkan individuals or groups to be able to empower and develop themselves so as to adapt to changes and developments of the times. The first strategy of empowering street vendors is the strategy of directional approach, second strategy is group approach, group approach in empowering street hawkers in urban areas. 4. Strengthening network among street vendors as well as building awareness and network of resources and encouraging active involvement of street vendors.

Keywords: Strategy, Empowerment, Street Traders

Abstrak

Kehadiran PKL di sudut-sudut kota memberikan keuntungan bagi konsumen, pemerintah ataupun untuk pedagang seperti menekan jumlah pengangguran, serta menyediakan berbagai keperluan masyarakat dengan harga relatif terjangkau. Pada sisi lain, PKL sering dikaitkan dengan dampak negative bagi lingkungan perkotaan dengan munculnya kesan kotor, kumuh, dan tidak tertib. Tidak heran jika masyarakat sering mengeluh akibat dari aktivitas PKL yang memanfaatkan fasilitas publik untuk berjualan. Pemberdayaan masyarakat idealnya tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya,

terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang implementatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga nilai tambah sosial dan nilai tambah budaya. Pendidikan Non formal berfungsi membelajarkan individu atau kelompok agar mampu memberdayakan dan mengembangkan dirinya sehingga mampu beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Strategi pemberdayaan pedagang kakilima yang pertama adalah strategi pendekatan terarah, Strategi yang kedua yaitu Pendekatan kelompok, pendekatan kelompok dalam upaya memberdayakan para pedagang kaki lima di perkotaan. 4. Penguatan jaringan antar pedagang kaki lima serta membangun kepedulian dan jaringan sumber daya dan mendorong keterlibatan aktif dari para pelaku pedagang kaki lima.

Kata Kunci : Strategi, Pemberdayaan, Pedagang Kaki Lima

PENDAHULUAN

Kompleksnya problema kehidupan sosial ekonomi yang semakin dirasakan oleh sebagian lapisan masyarakat, dan keinginan mereka untuk terus berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya yang cenderung terus meningkat, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf penghidupan yang layak dan status sosial ekonomi yang mapan. Dalam masyarakat yang penuh dinamika seperti masyarakat Indonesia tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup ini di antaranya di tempuh untuk mengembangkan berbagai macam usaha serta jenis pekerjaan guna meningkatkan status sosial ekonomi mereka.

Kehidupan yang dinamis tentang pertumbuhan dan perkembangan penduduk baik dari segi sosial, kultural dan budaya dewasa ini telah mengarahkan mobilisasi penduduk atau perpindahan penduduk dari arah pedesaan ke arah perkotaan dulu dikenal sebagai urbanisasi tetapi sekarang konsep dari urbanisasi sendiri telah mengalami perluasan yang cukup kompleks. Urbanisasi tidak lagi dipandang sebagai alur perpindahan populasi penduduk dari desa ke kota melainkan sebagai konsep dasar pemikiran baru tentang proses pengkotaan. Sekilas memang terlihat sama tetapi kedua kajian tersebut sangat berbeda jauh dan mulai saat ini paradigma baru tentang urbanisasi yang benar harus sudah dilakukan Soekanto Reksohadiprojo (2008 : 13)

Kehidupan masyarakat tidak pernah terlepas dari apa yang disebut dengan mobilitas sosial atau gerak sosial. gerak sosial atau mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial (social structure) yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencakup sifat-sifat hubungan antara individu dalam kelompok dan hubungan antara individu dengankelompok nya. Alisyahbana, (2005:46). Apabila seorang guru kemudian pindah dan beralih pekerjaan menjadi pemilik toko buku, maka dia melakukan gerak sosial. Juga apabila seorang yang semula mendapat gaji bulanan sebesar Rp 250.000 kemudian pindah pekerjaan karena tawaran

dengan gaji yang lebih tinggi. Proses tadi tidak saja terbatas pada individu-individu saja, akan tetapi mungkin juga pada kelompok-kelompok sosial. Misalnya, suatu golongan minoritas dalam masyarakat berasimilasi dengan golongan mayoritas.

Kota menjadi pusat pembangunan sektor formal, maka kota dipandang lebih menjanjikan bagi masyarakat desa. Kota bagaikan mempunyai kekuatan magis yang mampu menyedot warga desa, sehingga terjadi perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kondisi tersebut di atas dikenal dengan teori faktor pendorong (push factor) dan faktor penarik (pull factor) dalam urbanisasi. Akan tetapi kota tidak seperti apa yang diharapkan kaum migran. Tenaga kerja yang banyak tidak bisa sepenuhnya ditampung sektor formal. Lapangan kerja formal yang tersedia mensyaratkan kemampuan dan latar belakang pendidikan tertentu yang sifatnya formal, sehingga tenaga kerja yang tidak tertampung dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya memilih sektor informal.

Fakta yang dapat dilihat adalah adanya ketidakmampuan sektor formal dalam menampung tenaga kerja, serta adanya sektor informal yang bertindak sebagai pengaman antara pengangguran dan keterbatasan peluang kerja, sehingga dapat dikatakan adanya sektor informal dapat meredam kemungkinan keresahan sosial sebagai akibat langkanya peluang kerja (Noor Effendy, 2000:46). Mereka para pekerja di sektor informal, banyak di "cap" sebagai pelaku ekonomi bayangan (shadow economy), black economy atau underground economy. Demikian pula para pedagang kaki lima telah dipandang sebagai patologi sosial karena kehadiran pedagang kaki lima digambarkan sebagai perwujudan pengangguran tersembunyi atau setengah tersembunyi atau setengah pengangguran yang luas atau sebagai pekerjaan sektor tersier sederhana yang bertambah secara luar biasa di dunia ketiga.

Kota menjadi tempat aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan jasa, perdagangan, dan industri. Kota juga menjadi daya tarik bagi penduduk luar kota untuk pergi ke kota dengan tujuan mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Akhirnya peningkatan jumlah penduduk di perkotaan semakin tinggi dan padat. Kondisi ini menimbulkan kurangnya ketersediaan lapangan kerja, terutama pada sektor formal mengakibatkan penduduk mencari alternatif pekerjaan lain dan sektor informal menjadi salah satu alternatif pekerjaan di perkotaan. Salah satu usaha pada sektor informal adalah sebagai pedagang kaki lima (PKL).

Kehadiran PKL di sudut-sudut kota memberikan keuntungan bagi konsumen, pemerintah ataupun untuk pedagang seperti menekan jumlah pengangguran, serta menyediakan berbagai keperluan masyarakat dengan harga relatif terjangkau. Pada sisi lain, PKL sering dikaitkan dengan dampak negative bagi lingkungan perkotaan dengan munculnya kesan kotor, kumuh,

dan tidak tertib. Tidak heran jika masyarakat sering mengeluh akibat dari aktivitas PKL yang memanfaatkan fasilitas publik untuk berjualan.

Fakta yang dapat dilihat adalah adanya ketidakmampuan sektor formal dalam menampung tenaga kerja, serta adanya sektor informal yang bertindak sebagai pengaman antara pengangguran dan keterbatasan peluang kerja, sehinggadapat dikatakan adanya sektor informal dapat meredam kemungkinan keresahan sosial sebagai akibat langkanya peluang kerja (Noor Effendy, 2000:46). Mereka para pekerja di sektor informal, banyak di “cap” sebagai pelaku ekonomi bayangan (*shadow economy*), *black economy* atau *underground economy*. Demikian pula para pedagang kakilima telah dipandang sebagai patologi sosial karena kehadiran pedagang kaki lima digambarkan sebagai perwujudan pengangguran tersembunyi atau setengah tersembunyi atau setengah pengangguran yang luas atau sebagai pekerjaan sektor tersier sederhana yang bertambah secara luar biasa di dunia ketiga.

Faktanya sejak dahulu hingga sekarang bahkan sampai kapanpun sektor informal tidak akan bisa dihapus atau dihilangkan karena itu pilihan bagi mereka yang menggeluti pekerjaan di sektor informal. Realitas diatas semakin membuat jarak, dikotomis dan menjadikan centang perenang antara yang formal dan informal antara yang legal dan ilegal. Oleh karena itu tepat kiranya jika ada upaya pelembagaan sektor informal sebagai salah satu bentuk penguatan terhadap eksistensi Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam pusaran modernitas.

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam kajian ini adalah Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.”(Nazir,1988: 111). Selanjutnya menurut Nazir (1998 : 112) studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topic penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari: buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll).

Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya. Dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan melakukan studi

kepastakaan peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya. Adapun bahan referensi utama dalam penulisan tulisan ini adalah Kartasasmita, Ginanjar. 1996. Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan dan Pranarka, AMW dan Prijono, Onny S (ed). 1996. Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi. CSIS. Jakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dikawasan Perkotaan

Bagaimana cara memberdayakan masyarakat merupakan suatu masalah tersendiri yang berkaitan dengan hakikat dari power atau daya (mengandung pengertian “kemampuan”, “kekuatan” ataupun , “kekuasaan”), serta hubungan antar individu atau lapisan sosial yang lain. Pada dasarnya setiap individu dilahirkan dengan daya. Hanya saja kadar daya itu akan berbeda antara satu individu dengan individu yang lain. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait (interlinking factors) antara lain seperti pengetahuan, kemampuan, status, harta, kedudukan dan jenis kelamin.

Faktor-faktor yang saling terkait tersebut pada akhirnya membuat hubungan antar individu, dengan dikotonomi subyek (penguasa) dan obyek (yang dikuasai) yang meliputi kaya-miskin, laki-laki-perempuan, guru-murid, pemerinah-warganya, antar agen pembangunan dan si miskin dan lain sebagainya. Bentuk relasi sosial yang dicirikan dengan dikotomi subyek dan obyek tersebut merupakan relasi yang ingin “diperbaiki” melalui proses pemberdayaan.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Produktivitas Tenaga Kerja

Studi-studi empiris di sejumlah negara yang dilakukan oleh Barro (1991, 1998), Mankiw dkk (1991) serta Nelson dan Pack (1998) menjabarkan tingkat pendidikan biasanya diukur dengan persentase tenaga kerja yang berpendidikan tinggi terhadap jumlah tenaga kerja atau penduduk yang terdaftar (enrolment) pada suatu tingkat pendidikan tertentu (Tambunan, 2001). Sedangkan Engelbrecht (2003) menyatakan bahwa Investasi yang lebih besar pada human capital dan akumulasi atau formasi modal fisik menyebabkan Amerika meraih keuntungan pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan dari sejumlah studi literatur ekonomi diperoleh berbagai macam fungsi human capital yang berguna untuk meningkatkan penghasilan individu dan sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi.

Perbaikan kualitas pendidikan diharapkan dapat memberi peluang pertumbuhan yang lebih tinggi di masa depan sebab dengan perbaikan pendidikan maka tenaga kerja akan memiliki kemampuan yang lebih baik

dalam mengoperasikan dan mengeksploitasi sumber daya ekonomi modern, Campbell dan Stanley (1986) menyebutkan investasi human capital adalah seluruh kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas (produktivitas) tenaga kerja pada waktu tertentu. Investasi human capital dapat dilakukan dengan pendidikan formal dan pelatihan yang diberikan selama bekerja.

Kunci keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Indonesia tidak mungkin dibebankan kepada satu pihak saja. Semua elemen masyarakat harus terlibat aktif dalam bentuk apapun dan dalam semua bidang-bidang yang ada. Pemerintah telah menyiapkan sistemnya, masyarakat dapat mengkritisnya dan memberikan masukan perbaikan dalam tahapan pelaksanaannya, dan media massa berperan sebagai jembatan penghubung informasi antar kedua belah pihak. Semua peran itu tersambung menjadi satu kelengkapan yang utuh. Masing-masing berperan dalam porsinya dan menjadi evaluator bersama pula. Keberadaan semua elemen penting ini akan menjadi keniscayaan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat di Indonesia.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pendidikan non formal tidak hanya memfokuskan pada keaksaraan tapi juga melaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan sebagai salah satu bagian dari pendidikan non formal. Tujuan utama pelatihan keterampilan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga nantinya memiliki nilai tambah pada saat terjun ke dunia kerja, dimana arah program pelatihan adalah pembekalan kepada peserta didik dengan berbagai keterampilan untuk dapat bekerja (pekerja) atau usaha mandiri (berwirausaha).

Selama ini yang kita kenal sebagai lembaga pendidik adalah sekolah, yang secara formal telah mendidik kita. Disisi lain ada lembaga pendidik lain yang secara informal memberikan ilmu dan pengetahuan terhadap peserta didiknya. Pendidikan secara informal dapat berupa lembaga kursus, lembaga bimbingan belajar dan lembaga pelatihan masyarakat. Ada juga lembaga pendidikan penyetaraan, yang membantu masyarakat putus sekolah untuk mendapatkan kesetaraan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan terakhir. Semua lembaga pendidik di luar sekolah formal inilah yang di sebut dengan lembaga pendidikan non formal.

Fungsi lembaga pendidikan non formal tidak jauh dari sekolah yaitu menyalurkan ilmu pengetahuan pada peserta didik. Selain sebagai tempat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan lembaga non formal juga digunakan sebagai tempat untuk meningkatkan keterampilan peserta didik. Oleh sebab itu banyak lembaga-lembaga non formal yang berdiri dengan basic pelatihan keterampilan.

Kebanyakan orang yang datang ke lembaga informal bertujuan untuk meningkatkan potensi yang mereka punya tetapi belum sempat di gali pada pendidikan formal. Seperti kursus kecantikan, menjahit, perbengkelan,

komputer dan lain-lain. Peserta didik yang datang pada lembaga-lembaga kursus tersebut dikarenakan ingin memiliki keterampilan yang selama ini belum dapat digali secara maksimal pada lembaga formal. Jika melihat menurut fungsi lembaga non formal tersebut, lembaga kursus seperti ini adalah lembaga non formal sebagai pelengkap.

Tujuan akhir dari suatu pemberdayaan khususnya dalam bidang ekonomi adalah meningkatkan pendapatan masyarakat lemah. Pendapatan masyarakat pada umumnya berasal dari dua sumber yaitu upah atau gaji dan surplus usaha. dari upah atau gaji masyarakat yang tidak “berdaya” hanya akan menerima upah yang rendah yang disebabkan rendahnya keterampilan yang mereka punya, rendahnya keterampilan masyarakat disebabkan oleh akses dan kesempatan mereka dalam mendapatkan pendidikan yang buruk. Oleh sebab itu, salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat khususnya pendapatan. Begitu juga untuk surplus usaha, masyarakat yang minim akan keterampilan umumnya tidak memiliki usaha, atau walaupun mereka memiliki usaha biasanya banyak memiliki kendala salah satunya kemampuan sumber daya manusia sehingga usahanya tidak bisa bersaing di pasar, yang akhirnya bisa gulung tikar. Maka disini pentingnya pemberdayaan pada masyarakat, sehingga apabila mereka telah memiliki keterampilan diharapkan dengan terjadi peningkatan keterampilan setelah mereka mengikuti pelatihan.

Program pemberdayaan masyarakat mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang merupakan warga belajar dan juga memberikan pengaruh pada lingkungan masyarakat diluar sasaran pemberdayaan, logikanya bahwa persoalan masyarakat miskin terutama tidak memiliki modal untuk berusaha, dengan adanya pendampingan dari pengelola PKBM maka memungkinkan adanya dana mobilitas modal dari tabungan kelompok yang digunakan. Usaha produktif yang dilakukan oleh kelompok juga membuka kesempatan kerja atau usaha bagi kelompok itu sendiri maupun masyarakat luas, jadi ada multiplier effect, hal ini sangat nampak saat sebuah jenis usaha berkembang maka mendorong jenis usaha lain untuk mendukung perkembangannya. Sebagai contoh dengan adanya industri kerajinan tenun maka beberapa warga masyarakat menjadi pemasok bahan baku, ketersediaan lapangan pekerjaan sehingga mendorong kegiatan perekonomian masyarakat.

Kegagalan dan keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh kemampuan semua pihak yang terlibat dalam proses pengembangan masyarakat untuk memahami realitas masyarakat. Pentingnya pembangunan dan pemberdayaan ini merupakan mekanisme pembangunan nasional yang menjadikan masyarakat pada akhirnya berperan sebagai pelaku utama kegiatan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi dan tindak lanjut, untuk itulah diperlukan payung hukum bagi penyelenggaraan sistem pembangunan nasional yang berbasis

pemberdayaan masyarakat dan sesuai dengan spirit kebangsaan Indonesia yang tidak hanya dapat menjembatani konteks mikro ke dalam konteks makro tetapi juga sebaliknya menerjemahkan konteks makro ke dalam konteks mikro. Pentingnya memberikan mandat tentang keberpihakan pemerintah sebagai fasilitator dalam pembangunan nasional yang memberikan peran aktif kepada masyarakat parsitipatif.

Pendidikan Non Formal Bagi Para Pedagang Kaki Lima

Mayoritas masyarakat memandang pendidikan sebagai kunci dalam mencapai tujuan dan kemajuan sosial, serta pembangunan bangsa. Pendidikan digunakan untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang berupa nilai-nilai luhur yang harus dilestarikan seperti rasa hormat kepada orang tua, kepada pemimpin kewajiban untuk mematuhi hukum-hukum dan norma-norma yang berlaku, jiwa patriotisme dan sebagainya. Pendidikan juga digunakan sebagai pemupuk rasa takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kemajuan-kemajuan dan pembangunan politik, ekonomi, sosial dan pertahanan keamanan.

Dalam artian pendidikan diharapkan mampu untuk mengembangkan wawasan masyarakat terhadap ideology tentang, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan secara tepat dan benar, sehingga membawa kemajuan pesat pada individu masyarakat dan negara untuk segera mencapai tujuan pembangunan nasional. Maka dari itu, pendidikan merupakan tanggung jawab semua pihak, mulai dari individu, keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Pendidikan juga sangat penting bagi masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai pedagang kaki lima untuk dapat meningkatkan kemampuan dan daya saing serta daya inovasi agar kelak pedang dapat mampu terus bertahan ditengah era globalisasi dan juga kemajuan zaman.

Pendidikan Non formal berfungsi membelajarkan individu atau kelompok agar mampu memberdayakan dan mengembangkan dirinya sehingga mampu beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Oleh karena itu pendidikan nonformal diharapkan dapat melayani kebutuhan pendidikan suplemen, pendidikan komplemen, pendidikan kompensasi, pendidikan substitusi, pendidikan alternatif, pendidikan pengayaan, pendidikan pemutakhiran, pendidikan atau pelatihan keterampilan, pendidikan penyesuaian, dan pendidikan pembibitan.

Pendidikan non formal diselenggarakan bagi para pedagang kaki lima di wilayah perkotaan yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Fungsi pendidikan nonformal mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional serta pengembangan sikap dan

kepribadian profesional. Oleh karena itu pendidikan non formal tidak seharusnya di pandang sebelah mata oleh masyarakat. Karena peranan yang penting dan juga fungsi dari pendidikan non formal yang sangat mendukung pembangunan nasional.

Pendekatan Pemberdayaan Pada Pedagang Kaki Lima

Dalam upaya memberikan peluang kecakapan hidup bagi para pedagang kakilima diwilayah perkotaan, perlu dikiranya strategi yang dapat memperkuat peran dan posisi perekonomian dari para pedagang kaki lima. Program yang harus dipilih adalah program yang berpihak dan memberdayakan para pedagang kaki lima. Program ini harus diwujudkan dengan langkah-langkah strategis yang diarahkan secara langsung dari perluasan akses para pedagang kaki lima pada sumber daya pembangunan dan menciptakan peluang bagi para pedagang.

Berpartisipasinya parapedagang kaki lima dalam proses pembangaunan tersebut maka akan secara langsung dapat membantu para pedagang tersebut dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang selama ini mereka hadapi.

Tiga pendekatan yang dapat dilakukan guna mengentaskan kemiskinan yang terjadi pada para pedagang kaki lima diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan terarah, yang dimaksudkan pendekatan terarah adalah pendekatan yang dilakukan benar-benar mengarah langsung ke masyarakat yang memang bekerja dan berpenghasilan utama sebagai pedagang kaki lima. Dengan adanya pendekatan yang terarah tersebut maka akan didapatkan data yang valid siapa saja yang benar-benar seorang pedagang kaki lima. Tujuannya adalah untuk memudahkan pendataan dan pengelompokan para pedagang kaki lima.
2. Pendekatan kelompok, pendekatan kelompok dalam upaya memberdayakan para pedagang kaki lima di perkotaan memiliki arti bahwa dalam upaya memberdayakan pedagang kaki lima dilakukan secara bersama-sama atau secara kelompok-kelompok kecil. Yang mana tujuan diciptakannya kelompok-kelompok kecil pedagang tadi akan dapat memberikan kemudahan guna memecahkan masalah secara bersama-sama. Dengan adanya kelompok-kelompok kecil para pedagang akan ada rasa senasib sepenangungan sesama pedagang kaki lima yang akan membuat mereka untuk selalu bantu-bantu dalam kondosi apapun.
3. Pendekatan pendampingan, artinya adalah selama proses pembentukan dan dan penyelenggaraan pemberdayaan para pedagang kaki lima harus selalu didampingi oleh pendamping yang profesional sebagai fasilitator yang dapat memperkuat dan mempercepat proses pemberdayaan yang dilkujkan pada para pedagang.

4. Penguatan jaringan antar pedagang kaki lima serta membangun kepedulian dan jaringan sumber daya dan mendorong keterlibatan aktif dari para pelaku pedagang kaki lima. Semakin kuatnya jaringan antar pedagana maka akan membuat masyarakat yang bekrja sebagai pedagang kaki lima menjadi lebih mudah untk dapat bekerja sama bahkan saling berbagi informasi terkait kegiatan perdagangan yang dilakukan.

Peningkatan Kualitas Pendamping atau Fasilitator Pemberdaya Pedagang Kaki Lima

Agar lembaga penyuluhan atau komunikasi pembangunan berhasil, setidaknya ada empat kondisi yang dibutuhkan dan perlu dikembangkan dalam organisasi penyuluhan tersebut, yaitu: 1) Kejelasan misi; 2) Kejelasan Standar kompetensi profesi penyuluh/fasilitator pemberdaya/pendamping; 3) Aktualisasi informasi/inovasi; dan 4) Penghayatan atas budaya organisasi penyuluhan/ pemberdaya masyarakat. Kejelasan misi yang dihayati bersama seluruh personil merupakan prasyarat bagi keberhasilan organisasi profesi pemberdaya masyarakat. Mengingat penyuluh atau fasilitator pemberdaya adalah penentu keberhasilan organisasi penyuluhan, maka pengembangan aspek kompetensi penyuluh perlu menjadi perhatian organisasi penyuluhan atau pemberdaya masyarakat dalam mengemban misi dan tugas-tugasnya, agar aktivitas dan program dapat lebih difokuskan pada pengembangan kompetensi warga masyarakat terkait yang sesuai dengan perkembangan tuntutan kebutuhan lingkungan. Penyuluh/fasilitator pemberdaya memiliki kebebasan atau otonomi untuk menentukan seberapa baik untuk mencapai visi dan mengemban misi penyuluhan/pemberdayaan masyarakat, sehingga penyuluh perlu diberi kesempatan untuk akses informasi dan inovasi seluas-luasnya, sehingga dapat berkreasi secara kompeten. Di India, Cyber Extension merupakan salah satu solusi yang terbaik untuk itu.

Apa yang dimaksud standar kompetensi, standarisasi kompetensi dan sertifikasi kompetensi ? Standar kompetensi adalah rumusan kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas atau syarat jabatan. Dengan dikuasainya kompetensi tersebut oleh seseorang, maka yang bersangkutan akan mampu: 1) mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan dengan terampil (baik); 2) mengorganisasikannya agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan dengan lancar (cermat); 3) memahami apa yang harus dilakukan bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula; dan 4) memahami bagaimana menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda.

Standardisasi kompetensi adalah proses merumuskan, menetapkan dan memberlakukan, menerapkan dan meninjau kembali standar kompetensi. Sertifikat kompetensi adalah jaminan tertulis atas penguasaan kompetensi

pada bidang dan jenjang profesi tertentu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah diakreditasi. Mengapa standarisasi kompetensi dibutuhkan ?

Manfaat kejelasan standar kompetensi ini adalah untuk institusi pendidikan dan pelatihan adalah: 1) Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum; 2) Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, dan sertifikasi. Kemudian, bagi dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja hal ini bermanfaat untuk: 1) Membantu dalam rekrutmen tenaga kerja; 2) Membantu penilaian unjuk kerja; 3) Dipakai untuk membuat uraian jabatan; dan 4) Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha/industri/pertanian. Di lain pihak standar kompetensi bermanfaat Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi, yaitu: 1) Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya; dan 2) Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

Kapan seorang penyuluh atau pemberdaya masyarakat sebagai komunikator pembangunan dapat dikategorikan sebagai penyuluh yang kompeten? Seseorang dikatakan sebagai Penyuluh yang kompeten apabila seseorang yang mampu (Sumardjo 2006): 1) mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan penyuluhan dengan terampil untuk memberdayakan orang-orang dalam upaya meraih kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakatnya; 2) mengorganisasikan sistem penyuluhan sehingga efektif memfasilitasi masyarakat dengan cermat agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri; 3) melakukan tindakan yang tepat bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana penyuluhan semula; 4) bagaimana menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugasnya sebagai penyuluh meski dengan kondisi yang berbeda (local specific); dan 5) mampu mensinergikan kepentingan lokal dengan kepentingan yang lebih luas.

Mengingat penyuluh/pemberdaya masyarakat sebagai pelaku utama dalam komunikasi pembangunan harus mampu beradaptasi dengan lingkungan wilayah kerjanya, maka budaya organisasi yang jelas perlu dikembangkan, misalnya menjunjung nilai (value) berkomunikasi secara asertif, dialogis dan konvergen; mengemban tugasnya secara seimbang, adil dan beradab; berpikir/berorientasi global dalam mengelola sumber daya lokal; hari esok harus lebih baik dari hari ini, dan sebagainya.

Organisasi penyuluhan atau pemberdayaan masyarakat yang berkorporasi di dunia yang semakin modern tidak terhindar dari tuntutan kebutuhan untuk mengembangkan kompetensi para penyuluh sesuai dengan perkembangan tuntutan kebutuhan sasaran penyuluhan/komunikasi pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan penetapan standar kompetensi bagi seorang penyuluh,

agar kinerja penyuluhan dapat diprediksikan arah, dijamin kompetensi dan kinerjanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan tulisan diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut :

1. Pendidikan Non formal berfungsi membelajarkan individu atau kelompok agar mampu memberdayakan dan mengembangkan dirinya sehingga mampu beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Oleh karena itu pendidikan nonformal diharapkan dapat membantuk memberdayakan pedagang kaki lima guna dapat lebih meningkatkan kapasitas hidup para pedagang kaki lima diwilayah perkotaan.
2. Strategi pemberdayaan pedagang kakilima yang pertama adalah strategi pendekatan terarah, yang dimaksudkan pendekatan teraraha adalah pendekatan yang dilakukan benar-benar mengarah langsung ke masyarakat yang memang bekerja dan berpenghasilan utama sebagai pedagang kaki lima.
3. Strategi yang kedua yaitu Pendekatan kelompok, pendekatan kelompok dalam upaya memberdayakan para pedagang kaki lima di perkotaan memiliki arti bahwa dalam upaya memberdayakan pedagang kaki lima dilakukan secara bersama-sama atau secara kelompok-kelompok kecil. Yang mana tujuan diciptakannya kelompok-kelompok kecil pedagang tadi akan dapat memberikan kemudahan guna memecahkan masalah secara bersama-sama. Dengan adanya kelompok-kelompok kecil para pedagang akan ada rasa senasib sepenangungan sesama pedagang kaki lima yang akan membuat mereka untuk selalu membantu dalam kondisi apapun.
4. Penguatan jaringan antar pedagang kaki lima serta membangun kepedulian dan jaringan sumber daya dan mendorong keterlibatan aktif dari para pelaku pedagang kaki lima. Semakin kuatnya jaringan antar pedagana maka akan membuat masyarakat yang bekrja sebagai pedagang kaki lima menjadi lebih mudah untuk dapat bekerja sama bahkan saling berbagi informasi terkait kegiatan perdagangan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2002. *Pemikiran-Pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Akbar,M.R. 2009. *Perbandingan PertumbuhanPenduduk Miskin dan Latar Pendidikan di Riau*.

- Alfian, Mely G. Tan, Selo Soemardjan, 1980. Kemiskinan Struktural, Suatu Bunga Rampai. Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial bekerja sama dengan HIPPIIS.
- Alistair, R. dkk. 2003. Class matters”: Human and Social Capital in the Entrepreneurial Process. *Journal of Socio-Economics* 32 (2003) 17-36. University of Aberdeen, Edward Wright Building.
- Anwar. 2004. Pendidikan Kecakapan Hidup: (Life Skill Education). Bandung Alfabeta.
- Arief, Zaenuddin (2002), Pengelolaan dan Pemberdayaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Makalah disampaikan pada Rakor Persiapan dan Penyelenggaraan Backstopping PKBM. November 2002 di Solo.
- Collier, P. 1998. Social Capital and Poverty. Social Development Department, Washington DC: World Bank
- Eriyatno. 2003. Sistem Ekonomi Kerakyatan: Suatu Tinjauan Dari Ilmu Sistem, Majalah Perencanaan Pembangunan, No.04, Maret 2003.
- Jamasy,Owin, 2004. Keadilan, Pemberdayaan & Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta: Belantika.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. CIDES. Jakarta.
- Pranarka, AMW dan Prijono, Onny S (ed). 1996. Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi. CSIS. Jakarta.
- Poloma, Margaret, M. 1994. Sosiologi Kontemporer. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Putnam, R. 1995. The Prosperous Community - Social Capital and Public Life”. American Prospect. Washington DC: World Bank
- Soegijoko dan Kusbiantoro. 1997. Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia. Grasindo. Jakarta.
- Soetjipto, 1992. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Semarang: Satya Wacana Press.
- Subejo. 2004. Peranan Social Capital Dalam Pembangunan Ekonomi: Suatu Pengantar Studi Social Capital di Pedesaan Indonesia. *Majalah Agro Ekonomi* vol. 11. No.1 juni 2004.
- Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. PT Refika Aditama. Bandung.

- Sumarno, 2002, Kosep Dasar Kebijakan Pendidikan Kecakapan Hidup(Life Skill),
Dinamika Pendidikan No. 02/th. IX November 2002, FIP UNY Yogyakarta
- Suyanto, Bagong (ed.), 1995. Problem Pengentasan Kemiskinan dan Upaya
Pengentasannya. Surabaya: Airlangga University Press.
- Suyanto, Bagong. 1996. Perangkap Kemiskinan: Problem dan Strategi
Pengentasannya Dalam Pembangunan Desa. Yogyakarta: Aditya Media.
- Usman,P.1995.Peran Sosiologi dalam Pengentasan Kemiskinan. Jakarta. Galia
Indonesia.
- Wang, Y. Informal Institution, Social Capital, and Economic Development.
Opening Times, No. 3